

Vocational Education Policy



WHITE PAPER

Vol. 1 Nomor 10 Tahun 2019

ISSN : 2685-5739

4TH

MENUJU
INDONESIA
UNGGUL



KURS HARI	
Kurs	Jual Rp.
Dollar US	13.228
Poundsterling	17.614
EURO	14.300

WEALTH MANAGEMENT SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN SMK MENUJU KEMANDIRIAN FINANSIAL SEKOLAH

BETTER POLICIES FOR BETTER VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING



Direktorat Pembinaan SMK

Ditjen Dikdasmen

Kemendikbud

**SMK
BISA-HEBAT**
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

Susunan Dewan Redaksi :

VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

ISSN : 2685-5739

Volume 1 Nomor 10 Tahun 2019

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Direktur PSMK, Dr. M. Bakrun, M.M

Ketua Redaksi

Kasubdit Program dan Evaluasi, Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.

Redaksi Pelaksana

Chrismi Widjajanti

Arfah Laidiah Razik

Farid Prasetyo Adi

Muhammad Abdul Majid

Ahmad Rofiuddin Syafaa

Editor

Gustriza Erda, S.Si, M.Si.

Fotografi, Desain & Artistik

Ari

Muhammad Raidinoor

Dzorif Fadlan

Online Redaksi

Muhammad Herdyka

Mitra Redaksi (*Editorial Advisory Board*)

1. Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Si (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang)
2. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
3. Hamid Muhammad, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta)
4. Dr. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes. (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)
5. Irmawaty, SE., M.Si (Universitas Terbuka)

Alamat Redaksi dan Distribusi :

Redaksi VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

Gedung E Lantai 12-13 Kompleks Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) – 5725477 (Hunting) 5725471-74 Fax. (021) – 5725049

Laman : psmk.kemdikbud.go.id, Surel : program.psmk@kemdikbud.go.id



WEALTH MANAGEMENT SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN SMK MENUJU KEMANDIRIAN FINANSIAL SEKOLAH

Arie Wibowo Khurniawan¹, Muklas Rivai²

Abstrak. Pada umumnya, aset dan kekayaan sekolah sangat penting dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan sekolah. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. *Wealth Management* dapat mengelola produktifitas kekayaan dimana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. Dalam manajemen keuangan, dikatakan memenuhi prinsip efektifitas, kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas lembaga tertentu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tujuan kajian ini adalah dalam rangka mencari berbagai alternatif pemikiran untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dan Menerapkan *wealth management* pada SMK. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa SMK harus mengembangkan manajemen keuangan yang transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Penerapan *wealth management* secara prinsip dapat diterapkan pada sekolah swasta atau sekolah negeri yang sudah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan ketentuan sesuai peraturan. Salah satu caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha sendiri yang keuntungannya untuk biaya pengembangan dan peningkatan sekolah sendiri serta tidak boleh menjadikan peserta didik sebagai objek pencari keuntungan. Dengan penggunaan *Wealth Management*, SMK dapat secara mandiri membiayai sekolah dan dapat melakukan investasi sebagai salah satu pendapatannya.

Kata Kunci: *Investasi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Wealth Management*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah *wealth management* mulai dipakai pada awal tahun 1990, dan mulai familiar di Indonesia pada tahun 2000 ketika bank asing yang beroperasi di Indonesia menawarkan jasa *wealth management*. *Wealth management* sebagai model yang lebih maju untuk perencanaan keuangan yang memberikan masukan pada individu, keluarga, maupun institusi terkait dengan manajemen aset. Pengelolaan aset kekayaan pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena pada setiap lembaga pasti mempunyai kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, semua jenis organisasi, termasuk organisasi atau lembaga

pendidikan memerlukan aset dan kekayaan lembaga (aset dan *wealth management*) (Mahali dan Hidayat 2016)

Tidak semua sekolah yang menyadari akan pentingnya pengelolaan aset atau kekayaan sekolah. Bahkan banyak lembaga yang tidak mengetahui kekayaan lembagannya. Akibatnya, lembaga tidak mampu secara maksimal mendayagunakan sumber dananya untuk membiayai keperluan lembaganya, dan akhirnya ketergantungan pada penyandang dana,(orang tua siswa, pemerintah, donatur). Sedangkan dana atau keuangan sangatlah vital dalam penyelenggaraan pendidikan dan harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan standar akuntansi (Herminto 2014).

¹ Kepala Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud

² Staf Subdit Program dan Evaluasi

Wealth management adalah ilmu bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi. Definisi ini memberikan masukan akan pentingnya setiap orang membuat perencanaan keuangan sejak semula, pada semua individu, keluarga, maupun organisasi. Pengelolaan pendidikan dengan *wealth management* yang baik, yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel harus terus diupayakan sebab pendidikan dengan pengelolaan dapat membawa bangsa bangkit dari keterpurukan dan menjadi investasi di masa yang akan datang (Kurniadin dan Mahali 2012).

Dalam Undang Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam kaitan dengan pengelolaan seluruh sumber dana pendidikan, termasuk sumber potensi keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, peran kepala sekolah sangat penting sebab komponen komponen seperti *man, money, dan material* tidak akan dapat menjelma berwujud tujuan yang akan dicapai jika tidak dikelola oleh seorang pemimpin sekolah yang tangguh.

Fenomena perebutan dan pencarian siswa pada awal masuk, menunjukkan bahwa sebuah sekolah masih sangat tergantung pada siswa sebagai sumber dana pembiayaan. Pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama sekolah yang diselenggarakan oleh negara, yang kedua sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang sejenis. Dalam definisinya, ***Wealth Management is a process of growing,***

protecting, and managing one's aset through finansial products and services.

Wealth Management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif dalam mengelola produktifitas kekayaan dimana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. *Wealth manajemen* sangat penting dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan lembaga pendidikan..

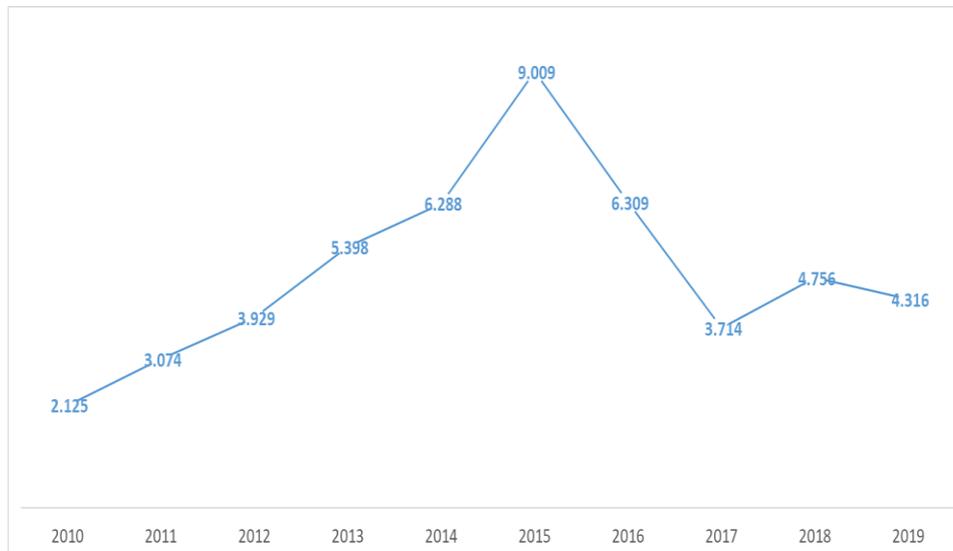
Dalam prespektif manajemen, *Wealth Management* di pandang sangat penting sekali, sebab sebuah SMK tidak hanya dipandang hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan saja, namun juga SMK harus dapat dipandang sebagai sebuah korporat yang memerlukan manajemen secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, SDM, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya (Mahali dan Hidayat 2016).

Munculnya Inpres No. 9 tahun 2016 menandakan adanya sebuah kondisi darurat dalam pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Sayangnya, munculnya Inpres pada tahun 2016 tersebut tidak dibersamai dengan alokasi anggaran yang meningkat.

Harus diakui bahwa politik anggaran pendidikan nasional belum bisa merepresentasikan keberpihakan untuk mendukung agresifitas program untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK di Indonesia. Pada gambar 1, diketahui derivatif anggaran pendidikan sampai pada unit kerja setingkat eselon II yaitu Direktorat Pembinaan SMK sebagai satuan kerja yang bertugas untuk menjalankan Inpres nomor 9 tahun 2016 terhadap kebutuhan untuk mengurus lebih dari 14.157 sekolah, jelas anggaran tersebut

jauh panggang dari api. Dilihat dari trend alokasi anggaran untuk pembinaan SMK dari tahun ke tahun baik ada atau tidaknya inpres cenderung tidak menunjukkan perubahan berarti. Hal tersebut beimplikasi pada sulitnya membangun

fasilitas sekolah sesuai dengan perkembangan industri dengan cakupan 14.157 sekolah dan penyediaan guru yang kompeten dan profesional dalam waktu yang cepat.



Sumber: Dit.PSMK (2019)

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Direktorat Pembinaan SMK tahun 2010-2019

Dengan melihat kondisi pembiayaan SMK yang sangat terbatas di atas, maka salah satu solusinya adalah SMK harus mampu mandiri secara finansial dan harus mampu berdiri di kakinya sendiri. Oleh karenanya pengkajian terhadap penerapan *wealth management* menjadi yang sangat relevan.

Tujuan

Tujuan pada kajian ini adalah:

1. Mencari alternatif pemikiran untuk pendanaan SMK yang tidak tergantung pada alokasi anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan gambaran alternatif mekanisme peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan SMK;
3. Sebagai wacana awal untuk dapat menerapkan *wealth management* pada tingkat SMK.

Manfaat

Manfaat pada kajian ini adalah untuk menguraikan pengetahuan tentang *wealth management* dan alternatif penerapannya pada Sekolah Menengah Kejuruan. Penerapan *wealth management* diantaranya meliputi dengan memahami regulasi, membuat wadah organisasi dan melakukan investasi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan dari kajian dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Literatur diambil dari jurnal nasional dan jurnal internasional yang digunakan menjadi dasar pemikiran. Kajian ini diawali dengan pengetahuan terkait *wealth management*. Kemudian pemikiran tersebut diuraikan secara mendetail. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah statistika deskriptif dan metode kualitatif dengan menjabarkan secara detail dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pengertian Wealth Management

Wealth management adalah suatu proses pengembangan, proteksi, dan pengelolaan, kekayaan seseorang atau organisasi melalui produk dan jasa finansial. *Wealth Management* juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam mengelola produktifitas kekayaan di mana sinergi diperoleh dari perencanaan dan pengembangan yang tepat. *Wealth management* dapat diklasifikasikan sebagai tipe yang lebih maju dari perencanaan keuangan yang memberikan nasihat untuk individu dan keluarga mengenai perencanaan tanah, manajemen aset, perpajakan, dan manajemen portofolio. Berkembangnya *wealth management* tidak lepas dari bergesernya budaya menabung ke budaya investasi. Pergeseran ini terjadi antara lain karena tingginya tingkat inflasi dibandingkan dengan tingkat pendapatan dari menabung sehingga orang mencari jalan dan cara agar kekayaannya tidak tergerogoti.

Ada yang menyamakan *wealth mangement* dengan *asset management*, *financial management*, atau *investment management*. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa *wealth management* hanyalah penggunaan istilah baru saja, dan tidak berbeda dengan istilah-istilah yang telah disebutkan. Terlepas dari itu semua, *wealth management* merupakan kemajuan atau pengembangan dari ketiga bentuk management tersebut dalam arti yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan menciptakan hubungan antara lembaga pemberi jasa dan klien yang jauh lebih intens. *Wealth management* mempelajari berbagai ilmu tentang bagaimana melindungi dan menjaga kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi atau pensiun. *Wealth management* meliputi *investment management*, *tax management*, *financial management*, dan *risk*

management. *Wealth Management* merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. Institusi, organisasi, lembaga atau bahkan diri manusia, dan termasuk juga sekolah membutuhkan adanya manajemen.

Wealth Management Dalam Penyelenggaraan SMK

Wealth Management sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pendidikan jalur formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya penyelenggara pendidikan dari masyarakat atau sekolah negeri yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena terbatasnya dana dan sumber dana yang tersedia. Untuk mengelola kekayaan atau keuangan, sebaiknya berpedoman pada prinsip dan kaidah manajemen keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan keuangan atau pembuatan anggaran keuangan tiap tahun.
- b. Kebijakan keuangan, mengelola tata keuangan dengan baik.
- c. Pencatatan keuangan, pembukuan keuangan atau keluar masuknya keuangan, pencatatan saldo awal dan akhir, dan sebagainya.
- d. Laporan keuangan, yaitu laporan keuangan akhir tahun.
- e. Audit laporan keuangan, yang dilakukan akuntan publik.

Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah peran seorang manajer sekolah atau Kepala Sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya fungsi manajemen keuangan dalam SMK adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen.

Prinsip-prinsip *Wealth Management* / Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-

undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berikut ini adalah penjabarannya:

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan SMK, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah serta DU/DI dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan kejuruan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, DU/DI, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya.

Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Misalnya Perencanaan RAPBS yang diterapkan di SMK Ma'arif, dibuat sebelum tahun ajaran baru. Dalam pelaksanaan transparansi yang diterapkan di SMK Ma'arif Diponegoro Sambego Depok Sleman, Bu Erna Widyastuti selaku Bendahara SMK mengatakan selalu ada transparansi ketika ada rapat bulanan disampaikan/laporan pada Kepala Sekolah dan disaksikan guru-guru yang lain dan kemudian ada laporan per-smester dengan yayasan. Dan ada juga laporan berupa rekapan yang dilaksanakan ketika rapat kerja tahunan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewangnya, (3) adanya partisipasi untuk

saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- b. Dilihat dari segi hasil, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Keuangan SMK

Pengelolaan keuangan yang baik, apakah itu untuk penyelenggaraan SMK adalah pengelolaan keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Untuk itu diperlukan antara lain, hal-hal sebagai berikut;

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan yang lazim dilakukan adalah pembuatan anggaran keuangan untuk setiap tahun dalam rangka mencapai visi, misi dan target yang telah ditetapkan di sekolah. Anggaran keuangan adalah rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam jumlah uang. Anggaran keuangan terdiri atas rencana pemasukan (sumber dan jumlah) dan rencana pengeluaran (keperuntukan dan jumlah). Dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditangani oleh yayasan, program kerja dan anggaran tahunan ini dibuat oleh pengurus yayasan dan disahkan oleh pembina yayasan.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan adalah tata kelola keuangan, yang jika ingin melakukan tata kelola yang baik, kita harus melakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), transparansi (*Transparency*), dan kemandirian (*independency*).

3. Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan biasanya disebut sebagai pembukuan keuangan. Kegiatan pembukuan keuangan termasuk pencatatan lalu lintas keuangan (masuk dan keluar), pencatatan saldo awal dan akhir, perhitungan penghapusan, perhitungan biaya, jurnal keuangan,

pencatatan aset, pencatatan utang-piutang, dan sebagainya.

4. Laporan keuangan

Berdasarkan pencatatan keuangan, setiap akhir tahun kita harus membuat laporan keuangan tahunan yang terdiri atas tiga golongan pokok, yaitu laporan posisi keuangan akhir tahun (neraca akhir tahun), laporan aktivitas keuangan (pendapatan dan biaya), laporan arus kas (penerimaan dan pengeluaran kas) yang dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan, perincian akun posisi keuangan, perincian laporan aktivitas, daftar aktivitas tetap, catatan investasi, kebijakan manajemen risiko, jumlah kewajiban pembayaran pajak penghasilan dan sebagainya.

5. Audit laporan keuangan

Agar lengkap, benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan atau penyelenggara pendidikan dasar dan menengah perlu diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini "wajar tanpa catatan". Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 16/2001 dan undang-undang nomor 28/2004 tentang yayasan, laporan keuangan yayasan termasuk yayasan penyelenggara pendidikan yang mempunyai kekayaan sebesar 20 miliar atau lebih, atau memperoleh bantuan negara atau pihak lain sebesar 500 juta atau lebih wajib diaudit oleh akuntan publik.

6. Analisis atas laporan keuangan

Analisis atas laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah keuangan penyelenggara pendidikan itu sehat, tidak sehat. Menuju arah lebih sehat menuju arah lebih buruk, dan sebagainya. Untuk itu tidak hanya memerlukan laporan keuangan tahun

terakhir, tetapi juga laporan-laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini, antara lain dilakukan dengan perhitungan rasio-rasio yang lazim dilakukan dalam manajemen keuangan seperti *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), *return on total asset* (ROTA), *debt to equity* (D/E).

Khusus untuk keperluan *Wealth Management*, kebijakan investasi, pengawasan investasi, dan manajemen resiko investasi harus jelas dirumuskan dan dilaporkan dalam setiap laporan keuangan tahunan secara eksplisit. Kebijakan investasi yang perlu dinyatakan dan dilaporkan secara tertulis dan eksplisit ini, antara lain adalah

1. Pedoman kebijakan investasi
2. Jumlah nilai investasi
3. Sumber dana investasi
4. Pedoman kebijakan manajemen risiko
5. Penetapan pejabat yang mengelola investasi
6. Batasan konsentrasi investasi
7. Batasan alokasi investasi
8. Penentuan dan penggunaan benchmark tertentu
9. Pengukuran risiko dengan metode tertentu
10. Penentuan jenis risiko yang dihadapi dan cara pananggulangan untuk masing-masing
11. Penggolongan investasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi
12. Perkembangan nilai dan hasil investasi

Pendanaan Pendidikan SMK

Dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendanaan pendidikan di Indonesia telah diatur antara lain sebagai berikut.

1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat 2 UUD RI 1945)
2. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan

belanja negara serta dai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat 4 UUD RI 1945)

3. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Pasal 46 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas)
4. Pemerintah dan pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD RI 1945 (Pasal 46 ayat 2 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas)
5. Sumber pendanaan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 47 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas)
6. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 48 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Dalam praktiknya pendanaan SMK yang diselenggarakan oleh negara, sebagian besar dibiayai oleh negara dan diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan (Yayasan perkumpulan, atau badan hukum lain yang sejenis). Dalam hal ini yang terakhir ini, pembiayai pendidikan SMK pada gilirannya akan ditanggung oleh para orang tua murid karena umumnya yayasan penyelenggara pendidikan SMK tidak mempunyai sumber pembiayaan lain yang cukup signifikan di luar sumbangan para anak didik. Dengan demikian, bagi mereka ini, *Wealth Management* sangat relevan dan diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan pendanaan mereka.

Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah suatu yayasan itu boleh melakukan usaha atau ikut dalam kegiatan badan usaha yang mendapatkan keuntungan karena yayasan adalah badan hukum nirlaba. Oleh karena itu perlu dicermati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 tahun 2001 dan UU nomor 28 tahun 2004 tentang “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Selanjutnya pasal 3 ayat 1 UU menyatakan bahwa “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu kegiatan badan usaha”. Selanjutnya Pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang menyatakan “yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan 1 tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Anggota pembina, pengurus, pengawas dilarang merangkap sebagai anggota direksi, atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dan badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)”. Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa **yayasan boleh melakukan kegiatan usaha namun dengan mendirikan badan usaha sendiri dengan ketentuan yang telah ditetapkan.**

Prinsip-prinsip investasi

Investasi adalah jantung atau tiang utama dari *Wealth Management*. Dengan kata lain, pengembangan kekayaan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan investasi. Oleh karena itu, investasi perlu dipahami secara benar dan lengkap, dan

dijalankan dengan perhitungan-perhitungan yang akurat. Investasi adalah komitmen dana pada satu atau lebih instrumen investasi untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan dalam investasi sangat bervariasi dari kecil sekali sampai besar sekali sehingga resikonya juga bervariasi, dari kecil sekali sampai besar sekali. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan SMK yang ingin menyelenggarakan *wealth management* perlu lebih dahulu memahami dan mempelajari seluk-beluk investasi.

1. Cara investasi

Investasi secara umum dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Disebut investasi langsung jika investor secara langsung membeli alat investasi tertentu, apakah itu berupa instrumen finansial atau barang fisik dengan menjalankan usaha melalui unit produksi. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan oleh investor dengan melalui perusahaan investasi, sedangkan yang melakukan investasi langsung adalah perusahaan investasi tersebut.

2. Pendapatan dan risiko investasi

Setiap tindakan tentu mengandung manfaat dan risiko tertentu, demikian halnya dengan investasi. Pendapatan investasi dapat berupa tambahan nilai kekayaan, dan risiko investasi adalah pengurangan nilai uang. Ada semacam hukum tertentu dalam investasi yang perlu dipahami, yaitu semakin besar pendapatan yang diharapkan maka “makin besar pula risiko yang dihadapi”, sedangkan semakin kecil pendapatan yang diharapkan “makin kecil pula risiko yang dihadapi”. Dengan kata lain, dalam investasi orang tidak dapat mengharapkan pendapatan besar dengan risiko kecil.

3. Alokasi Aset

Setiap orang yang memiliki kekayaan atau aset akan menempatkan atau menyebarkan aset tersebut dalam beberapa bentuk, apakah berbentuk uang atau barang. Alokasi aset adalah membagi jumlah investasi dan kekayaan lembaga ke dalam beberapa golongan aset. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan resiko sekecil mungkin. Investor tidak diharapkan untuk menempatkan seluruh nilai aset atau kekayaannya dalam satu bentuk investasi saja, misalnya semua asetnya disimpan atau ditanam dalam bentuk uang saja.

4. Manajemen Portofolio

Meskipun merupakan hal yang penting, berinvestasi dalam berbagai jenis aset atau lokasi aset hanyalah satu bagian saja dari perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Dalam mengambil keputusan tersebut, investor perlu memperhatikan suatu kombinasi yang optimal dari sejumlah jenis aset tersebut. Dengan kata lain, kekayaan harus dievaluasi dan dikelola dalam konteks portofolio, yang terdiri atas aset yang dimiliki investor, bukan secara satu per satu. Portofolio adalah kepemilikan sejumlah aset. Manajemen portofolio adalah pengelolaan seluruh aset yang ditempatkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan.

5. Diversifikasi

Diversifikasi aset pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan alokasi aset. Jika alokasi aset lebih ditekankan pada penyebaran nilai investasi. Tujuan diversifikasi aset dalam investasi juga dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan minimal risiko.

Investasi dapat dilakukan dalam bentuk barang/non keuangan atau melalui instrumen keuangan. Investasi barang/non keuangan

umumnya dilakukan dalam bentuk emas, rumah, tanah, lukisan, prangko, barang antik, usaha penyewaan, usaha produksi dan sebagainya. Investasi dalam bentuk instrumen keuangan dilakukan misalnya, melalui deposito, sertifikasi Bank Indonesia, bursa valuta asing, obligasi, saham, reksadana, asuransi, dan produk derivatif. Masing-masing bentuk investasi mempunyai ciri khas yaitu dalam hal penghasilan, resiko, pasar, cara jual beli, manajemen dan sebagainya.

Sikap Penyelenggara Sekolah

Akhirnya perlu disampaikan bahwa ada semacam *conditio sine qua non* (Persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi) dalam penggunaan dan penerapan *wealth management* sebagai cara untuk mengelola keuangan atau kekayaan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah. Beberapa sikap dasar yang perlu diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menyadari fungsi penyelenggara sebagai manajer

Terlepas dari beberapa dimensi makna pendidikan SMK, ada satu dimensi yang perlu disadari dan diperhatikan, yaitu dimensi korporasi dimana SMK dilihat sebagai suatu korporat yang memerlukan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan) dalam bidang pengajaran, keuangan, kekayaan, sumber daya manusia, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya. Dalam hal ini, para penyelenggara SMK ada hakekatnya adalah seorang manajer sehingga perlu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai manajer.

2. Menyadari kegunaan *wealth management*

Salah satu pengembangan manajemen terakhir dalam pengelolaan kekayaan adalah

wealth management. Semula *wealth management* hanya dikembangkan oleh perusahaan keuangan, baik bank maupun non bank, sebagai salah satu bentuk layanan kepada pelanggan, namun selanjutnya perkembangan menjadi kebutuhan semua orang dan entitas yang dapat digunakan sendiri dan untuk kalangan sendiri, meskipun jasa perusahaan keuangan tetap dibutuhkan. Para penyelenggara sekolah dasar dan menengah perlu menyadari kegunaan ini sebagai sarana untuk mengelola ruangnya dalam arti memelihara, mengamankan dan mengembangkan nilainya agar bermanfaat secara optimal.

3. Meninggalkan sikap penabung dan menggantinya dengan sikap investor
Sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, di satu pihak jantung *wealth management* adalah investasi, sedangkan dipihak lain sikap tradisional para penyelenggara pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah, adalah menabung. Banyak yang masih menjauhkan diri dari kegiatan investasi karena berbagai alasan, seperti menganggap investasi sebagai perjudian, takut kekayaannya hilang mengingat pengalaman buruk orang lain, tidak mengetahui caranya, tidak mengetahui keunggulannya dibandingkan dengan menabung dan sebagainya.
4. Mempelajari dan memahami seluk-beluk investasi
Untuk mengubah sikap penabung, penyelenggara pendidikan perlu mempelajari dan memahami seluk beluk investasi, antara lain: mengenai prinsip-prinsip investasi, jenis-jenis investasi, pendapatan dan risiko setiap jenis investasi, bagaimana penyelenggara sekolah-sekolah dari negara-negara yang lebih maju

menyelenggarakan *wealth management* mengapa investasi tidak termasuk kategori berjudi, bagaimana perbandingan antara pendapatan dan risiko berinvestasi dan menabung dan sebagainya.

5. Bergeser dari kuadran kiri ke kuadran kanan dalam pendekatan *cashflow quadrant*
Pergeseran dari kuadran kiri/bawah yaitu E (*employee*/pegawai, tergantung pada gaji) dan S (*self-employee*/pekerja keras, tergantung pada kegiatan sendiri) ke kuadran kanan/atas yaitu B (*business owner*/pemilik usaha, tergantung pada bisnisnya) dan I (*investasi*/penanam modal, tergantung pada hasil investasi).
6. Mulailah berinvestasi secara bertahap
Keyakinan dan pemahaman pengertian tidaklah lengkap jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Oleh karena itu, mulailah melakukan *wealth management* dengan melakukan investasi setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Hanya dengan pengalaman, keyakinan dan pemahaman tentang investasi ini dapat diperoleh secara penuh.

Pemupukan Dana Abadi

Jika kita meriview mekanisme pendanaan pendidikan pada negara maju, seperti Amerika maka dikenal adanya Dana Abadi. Penyebutan Dana Abadi yang di Amerika Serikat lazim disebut *endowment*, adalah sejumlah dana yang diinvestasikan sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya tidak disentuh untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pendapatan dari investasinya dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dan kegiatan rutin. Dana abadi ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Di Amerika Serikat pemupukan *endowment* sudah lama dipraktikkan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk untuk pendidikan dasar

dan menengah. *Endowment* merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, pemupukan dana abadi merupakan salah satu strategi penting dalam *wealth management*.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Wealth Management atau Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalan atau tidaknya kegiatan pendidikan di sekolah. Dengan *Wealth Management* pendidikan sekolah dapat mengembangkan manajemen keuangan yang transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Penerapan *wealth management* secara prinsip dapat diterapkan pada pendidikan SMK dengan ketentuan seseuai peraturan. **Salah satu caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha sendiri yang keuntungannya untuk biaya pengembangan dan peningkatan sekolah sendiri.** Dengan penggunaan *Wealth*

Management, sekolah dapat secara mandiri membiayai sekolah dan dapat melakukan investasi sebagai salah satu pendapatannya. Namun sekolah harus memahami prinsip-prinsip investasi dan secara perlahan-lahan sekolah harus mempunyai sikap-sikap yang harus dimiliki pada *wealth management*.

Rekomendasi

Wealth Management dapat dikembangkan di pendidikan SMK yang selain dapat menjadi manajemen keuangan yang transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta dapat secara mandiri membiayai pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Pembuatan badan usaha dibawah sekolah perlu dilakukan sebagai langkah awal penerapan *wealth management*. Kemudian SMK perlu mempunyai dana abadi yang dapat dikumpulkan dari alumni, DU/DI, pemerintah atau lainnya sebagai biaya operasional sekolah tanpa harus menunggu alokasi anggaran dari pemerintah atau pemerintah daerah setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Ara dan Mahalli, Imam. 2016. *The Handbook of Education Management*. Jakarta: Kencana
- Kurniadin, Didin dan Mahalli, Imam. 2012. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Herminto, Agustinus, 2014, *Kepemimpinan Pendidikan Diera Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang pengertian yayasan.